

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH OLEH
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN CIAMIS
(Studi Analisis Di Sentra Industri Rajut “Jemari Trampil”
Desa Baregbeg Kabupaten Ciamis)**

Mira Putri Setiyadi¹, Cecep Cahya Supena², Etih Henriyani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail : miraputris16j@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang membuat program pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis terhambat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek perencanaan atau *policy makers*/pembuat kebijakan pada program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan wawancara sebanyak 4 informan. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan. Aspek perencanaan atau *policy makers* dalam program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya beberapa kendala dalam implementasi kebijakan program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah seperti pelaku usaha industri yang berusia di atas 40 tahun merasa tidak semua diikutsertakan dalam program pembinaan tetapi hanya dijadikan narasumber. Sehingga timbul persepsi bahwa perhatian dari dinas masih kurang, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan kemampuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk mengkoordinasi pelaku usaha industri kecil menengah yang sangat banyak dan belum dapat dibenahi. Selain itu, masih ada Sebagian pelaku usaha industri yang sulit diatur. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara bertahap, mengumpulkan biodata, serta berusaha memberikan pemantauan yang berkelanjutan agar program pembinaan dapat berjalan efektif dan mencakup semua kelompok usia.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembinaan, Industri Kecil Menengah.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian yang paling penting dari ekonomi suatu negara adalah industri dan perdagangan, yang tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi tetapi juga mampu menghasilkan uang untuk penghidupan dan pembangunan masyarakat (Andriani, R., Djadjuli, R. D., & Henriyani, E, 2024). Industri Kecil Menengah memainkan peran penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial seperti mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, usaha kecil (IKM) bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan yang terkena dampak aktivitas ekonomi IKM. Namun, usaha kecil memiliki banyak kendala sehingga mereka tidak dapat secara cepat mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, IKM tidak boleh mengabaikan peran modal intelektual dalam meningkatkan kinerja mereka. Modal intelektual secara signifikan meningkatkan keunggulan kompetitif, jadi IKM tidak hanya harus berkonsentrasi pada upaya pemenuhan.

Maka dari itu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan didirikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di Kota Ciamis, sehingga mereka dapat bersaing dalam industri perdagangan dan jasa. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Masyarakat

berperan penting dalam pembangunan, dan pemerintah harus mengatur, membimbing, melindungi, dan meningkatkan usaha. Dalam konteks ini, perencana atau pembuat kebijakan (*policy makers*) menjadi sangat penting karena tidak hanya tentang menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan yang telah dipilih dan dirumuskan oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) bukan berarti kebijakan tersebut pasti berhasil dalam mengimplementasikannya.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Iwan H (103:2020), bahwa Implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam sebuah kebijakan. Di mana implementasinya sebuah kebijakan akan mengandung resiko kegagalan bila tidak terimplementasikan dengan baik. Tidak terimplementasikan di sini mengandung arti bahwa suatu kebijaksanaan tidak terlaksanakan sesuai dengan rencana, tidak efisien dalam pekerjaannya atau kurangnya kerja sama antar pihak– pihak pelaksana, yang tentunya akan berakibat terhadap implementasi yang efektif sukar untuk dicapai. Sedangkan Implementasi kebijakan menurut Nugroho (Iwan, dkk. 2020:110), menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Untuk mewujudkan implementasi kebijakan program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencana atau pembuat kebijakan (*policy makers*) yang dapat bertanggungjawab atas pengembangan dan implementasi kebijakan yang dapat membawa perubahan kepada pelaku usaha industri kecil menengah. Selain itu dapat memberikan Solusi inovatif terhadap masalah yang ada.

Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Rogers (Wahyu, dkk. 2023:4), bahwa “Perencana atau *policy makers* ini bisa dari kalangan pemerintah, swasta, Lembaga swadaya Masyarakat maupun Lembaga pendidikan’. Adapun indikator perencana atau *policy makers* di antaranya :

1. Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan terkait usia pelaku binaan yang tidak dibatasi oleh umur dan tidak mengedepankan usaha yang baru saja.
2. Evaluasi kebijakan terkait pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah.

Aspek Perencana atau *policy makers* adalah orang yang membuat kebijakan dan mengatur pembangunan dalam suatu sistem sosial dan

bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah, membuat solusi, dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan. Perencana bertanggung jawab untuk membawa inovasi ke dalam suatu organisasi atau komunitas dalam konteks pembinaan

Aspek perencana atau *policy makers* pada program pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis masih perlu peningkatan, terutama dalam implementasi kebijakan usia pelaku usaha industri, di mana pelaku usaha industri yang berusia di atas 40 tahun ke atas merasa tidak semua diikutsertakan dalam program pembinaan tetapi hanya dijadikan narasumber. Sehingga timbul persepsi bahwa perhatian dari dinas masih kurang, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan kemampuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk mengkoordinasi pelaku usaha industri kecil menengah yang sangat banyak dan belum dapat dibenahi. Selain itu, masih ada Sebagian pelaku usaha industri yang sulit diatur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis?”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis. Adapun data yang termasuk dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara, rekaman video atau audio dan pengambilan foto serta data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis. Sedangkan Sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan yang terdiri dari 4 informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Rogers (Wahyu, dkk. 2023:4), yang membahas mengenai komponen yang selalu terlibat dalam pembinaan, salah satunya yaitu aspek perencana atau *policy makers*, dengan indikator kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan terkait usia pelaku binaan yang tidak dibatasi oleh umur dan tidak mengedepankan usaha yang baru saja, dan indikator evaluasi kebijakan terkait pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, peneliti menggunakan indikator pengukuran perencana atau *policy makers* menurut Rogers (Wahyu, dkk. 2023:4), dengan indikator Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan terkait usia pelaku binaan yang tidak dibatasi oleh umur dan tidak mengedepankan usaha yang baru saja, dan indikator evaluasi kebijakan terkait pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah.

Berikut merupakan hasil analisis berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan terkait usia pelaku binaan yang tidak dibatasi oleh umur dan tidak mengedepankan usaha yang baru saja.

Pembinaan dapat berjalan dengan lancar jika perencana atau pembuat kebijakan memperhatikan beberapa aspek penting yaitu, analisis yang mendalam harus dilakukan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan komitmen yang kuat harus ditunjukkan dalam implementasi kebijakan. Pembinaan yang tidak membatasi usia pelaku binaan memungkinkan berbagai kelompok umur untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima pembinaan dan bantuan, hal ini sangat penting karena dapat mendukung berbagai tahapan pelaku usaha industri kecil menengah seperti, pelaku usaha yang telah lama berdiri memerlukan pembaruan dan

peningkatan kompetensi untuk tetap relevan dan bersaing di pasar sedangkan pelaku usaha yang baru membutuhkan bimbingan untuk memahami dasar-dasar manajemen bisnis dan pemasaran. Dengan kebijakan yang inklusif dan tidak membatasi usia pelaku binaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dapat membuat pembinaan yang efektif dan berkelanjutan. Perencana dan pembuat kebijakan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa semua aspek dari kebijakan ini diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan terkait usia pelaku binaan yang tidak dibatasi oleh umur dan tidak mengedepankan usaha yang baru saja belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari informan yaitu selaku pelaku usaha industri kecil menengah merasa pihak dinas lebih mengutamakan pelaku usaha yang berumur kurang dari 40 tahun dan pelaku usaha yang lebih dari 40 tahun ke atas merasa tidak begitu diutamakan dan sudah tidak diikutsertakan dalam pembinaan. Adapun hambatan yang timbul selama ini yaitu karena kurangnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk membawahi atau membidangi semua IKM yang begitu banyak.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis yaitu dengan terus berupaya meningkatkan SDM dan memberikan biodata, seleksi semua usia, serta berusaha memberikan pemantauan berkelanjutan kepada semua pelaku usaha industri. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Putra A (2020:104), bahwa “Pemantauan atau *monitoring* adalah kegiatan untuk mengawasi atau mengamati secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kegiatan atau program”.

Dengan adanya pemantauan berkelanjutan, pengumpulan biodata yang akurat, dan seleksi usia yang tepat semua pelaku usaha yang mengikuti atau terlibat program pembinaan dapat terpantau dan semua terbidangi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan mereka dapat terus berkembang setelah pelatihan dan tidak hanya berakhir pada tahap awal pembinaan saja. Hal tersebut akan membuat program pembinaan berjalan secara efektif dan merata bagi semua pelaku usaha yang terlibat.

2. Evaluasi kebijakan terkait pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah.

Pembinaan dapat berjalan dengan baik apabila adanya transparansi dan tanggung jawab serta akuntabilitas yang diterapkan dalam proses implementasi, dukungan dari lembaga terkait dan adanya evaluasi berkelanjutan untuk menentukan dampak dari kebijakan dan melakukan

perbaikan jika diperlukan. Evaluasi merupakan elemen penting dalam proses pembinaan terhadap pelaku usaha Industri Kecil Menengah. Kebijakan yang efektif haruslah tidak hanya dirumuskan dengan baik, tetapi juga dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dan memberikan dampak yang positif. Hal ini karena dapat mengukur seberapa jauh kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan menilai dampak kebijakan terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha industri Kecil Menengah. Melalui evaluasi yang transparan, bertanggung jawab, dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator evaluasi kebijakan terkait pembinaan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah sudah dilaksanakan tetapi masih perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dalam aspek koordinasi maupun implementasinya. Dilihat dari pelaku usaha industri kecil menengah yang begitu banyaknya sedangkan kemampuan dinas masih terbatas. Adapun permasalahan dan hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan kemampuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk mengkoordinasi pelaku usaha industri kecil menengah yang begitu banyaknya dan belum bisa dibenahi serta masih ada sebagian pelaku usaha industri kecil menengah yang sulit untuk diatur.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM

dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dengan terus berusaha mengarahkan, memberikan konseling, membimbing dan memberikan pelayanan yang berulang agar meningkatkan mentalitas kewirausahaan dan mendapatkan ilmu bagi kemajuan pelaku usaha industri kecil menengah selain itu, meningkatkan aspek koordinasi dan implementasi secara bertahap. Dengan demikian, upaya tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Putra Apriadi (2020:105), bahwa “Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai hasil yang dicapai oleh program tersebut dengan sumber daya (*input*), keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang digunakan”. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan seperti memberikan konseling dan bimbingan berulang kali adalah bagian dari intervensi atau tindakan yang dapat dianggap sebagai *input* dalam evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan *output* (kemampuan kewirausahaan) dan *outcome* (kemajuan usaha kecil menengah) yang kemudian akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaku usaha dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, program pembinaan pelaku usaha industri kecil menengah oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis sudah terlaksana namun belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya

beberapa hambatan yaitu pelaku usaha industri di rentang usia 40 tahun ke atas merasa tidak semua di ikutsertakan kembali dalam pembinaan dan merasa bahwa perhatian dari dinas tidak seimbang karena kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan kemampuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk mengkoordinasi dan membidangi pelaku usaha yang begitu banyak serta masih ada sebagian pelaku usaha industri kecil menengah yang sulit untuk diatur. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu di antaranya ialah seperti meningkatkan sumber daya manusia dan pemantauan berkelanjutan. Terus berusaha mengarahkan, memberikan konseling, membimbing dan memberikan pelatihan yang berulang agar meningkatkan mentalitas kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., Djadjuli, R. D., & Henriyani, E. (2024). Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Desa Patakaharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-10.
- Iwan H, Luki N, Dyera O. 2020. "Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang". *Jurnal Moderat*.2(2):110.
- Putra A, Reni A, Zuhina A. 2020. *Promosi Kesehatan Lanjutan Dalam Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Wahyu, Tri Atmodjo, Hidayat dan Misgiya. 2023. *Pembinaan Masyarakat Berbasis Local Wisdom. Cetakan Pertama*. Deli Serdang: CV. Format Publishing.